

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA MERPAK  
KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**

**SKRIPSI**



**ALPHA AMDRA PRAGOGA  
NIM : B1033171035**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Alpha Amdra Pragoga  
NIM : B1033171035  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dana  
Desa Merpak Kecamatan Kelam permai  
Kabupaten Sintang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Tahun 2017 (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.



Tanda tangan dikenakan pada materai

## **PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alpha Amdra Pragoga  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Ujian : 24 Januari 2023  
Judul Skripsi : “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Merpak  
Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang”

Menyatakan bahwa Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang diujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 07 Februari 2023



Alpha Amdra Pragoga  
NIM. B1033171035

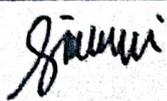
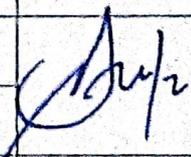
**LEMBAR YURIDIS****AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA MERPAK  
KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**

Penanggung Jawab Yuridis

(Alpha Amdra Pragoga)  
(B1033171035)

Jurusan : Akuntansi  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
 Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : (24/01/2023)

**Majelis Penguji**

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	TandaTangan
1	Ketua Penguji	Syarbini Ikhsan, SE, MM, Ak, CPA	07/02/2023	
		NIP. 196512201994021001		
2	Penguji 1	Vitryan Espa, SE, MSA, Ak, CHt, CA	07/02/2023	
		NIP. 197809062005011002		
3	Penguji 2	Djunita Permata Indah, SE, M.Acc	07/02/2023	
		NIP. 199106142019032019		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus  
 Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, Juni 2023  
 Ketua Program Studi (Akuntansi)

  
 ( Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., C.A. )  
 NIP.197906182002122003

## **KATA PENGANTAR**

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Adapun Judul Penulisan skripsi ini adalah “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Merpak Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang“. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dalam kurikulum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini banyak ditunjang dengan bantuan tenaga, pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus. Penulis sangat bersyukur karena berkat Tuhan selalu menyertai selama penulis mengerjakan skripsi ini dari awal sampai akhir
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., MM, Ak, CA, CMA, CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., MM, Ak, CA, CMA, CPA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Vitriyan Espa, S.E., M.S.A., Ak., C.Ht., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, serta selaku Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktu

untuk hadir dalam sidang Skripsi/komprehensif dan memberikan kritik, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi.

5. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si, Ak, CA. selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Sari Rusmita, S.E., MM, CIQaR selaku Ketua PPAPK Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Djunita Permata Indah, SE, M.Acc selaku Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam sidang Skripsi/komprehensif dan memberikan kritik, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Drs. Syarbini Ikhsan, SE, MM, Ak, CPA selalu Dosen Pembimbing yang bersedia hadir dalam sidang Skripsi/komprehensif dan memberikan kritik, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, Perpustakaan dan seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Kepala Desa Merpak beserta Badan Pengurus Desa yang sudah memberikan tempat dan waktu untuk saya melakukan penelitian.
12. Kedua orang tua tercinta Bapak Amos Avonsius dan Ibu Hendra Oeka yang telah membesarkan, mendidik, memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan hingga tugas akhir ini.
13. Ibu Melati orang tua penulis selama di Pontianak yang telah memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan.
14. Adik tercinta Betrich Febrila Teovani yang telah memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan.

15. Kekasih penulis Yanna Tiura Putri yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
16. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril, materil dan motivasi selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menyemangati selama proses penyusunan skripsi ini.
18. Teman-teman di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak, khususnya Program Studi PPAPK Akuntansi angkatan 2017 yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pontianak, 07 Februari 2023



Alpha Amdra Pragoga  
NIM. B1033171035

## **ABSTRAK**

### **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**

**Oleh :**

**Alpha Amdra Pragoga  
B1033171035**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dalam konteks akuntabilitas pengelolaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Merpak selama ini sudah cukup baik berdasarkan laporan dan bukti hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner dalam pengelolaan alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

**Kata kunci:** desa, akuntabilitas, alokasi dana desa

## **ABSTRACT**

### **ACCOUNTABILITY FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF VILLAGE FUND MERPAK KELAM PERMAI DISTRICT, SINTANG REGENCY**

**By:**

**Alpha Amdra Pragoga  
B1033171035**

The purpose of this study is to describe the extent of accountability for the management of village fund allocations in Merpak village, Kelam Permai District, Sintang Regency in the context of management accountability starting from the planning, implementation, business management, to reporting and accountability stages in Merpak Village, Kelam Permai District with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning guidelines for village financial management. This research method uses a descriptive qualitative approach with datacollection techniques through interviews, observations, documentation, and questionnaires. Based on the results of the study, it can be concluded that the accountability of village fund allocation management in Merpak Village so far has been quite good based on reports and evidence from interviews, observations, documentation, and questionnaires in managing village fund allocations starting from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages.

**Keywords:** village, accountability, village fund allocation

## **RINGKASAN SKRIPSI**

### **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**

#### **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika *good governance* menjadi pertanda tercapainya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem pertanggungjawaban dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan dan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara efisien, berhasil dan bersih, bertanggung jawab dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Apriliani, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (romantis,2015).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah memiliki kontrol lebih besar atas pengelolaan wilayahnya. Salah satu bentuk kepentingan negara dalam pembangunan pedesaan adalah pemerintah menyediakan dana desa bagi desa dalam APBN untuk pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran, yang ditransfer untuk pembangunan desa dalam bentuk dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Desa merupakan unit terpenting dalam proses pembangunan setiap negara dan negara. Hal ini menjadikan desa sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan hak-hak publik oleh masyarakat setempat. Selain itu, desa menjadi ruang politik terdekat bagi hubungan masyarakat dengan penguasa (pejabat desa).

Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) mendefinisikan akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagai kemampuan perangkat desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Akuntabilitas mencakup lebih dari sekadar kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan saat ini. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Tata kelola pemerintahan dan administrasi bisnis harus fokus pada tujuan utama akuntabilitas, sehingga setiap pengelola dapat menyampaikan tanggung jawab keuangan dengan menyusun laporan keuangan.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu contoh daerah otonom di Kalimantan Barat yang beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sintang juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Desa Merpak merupakan desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Secara geografis Desa Merpak terletak dibawah kaki Bukit Kelam dan memiliki 1.215 penduduk, dan terbagi atas 5 Dusun yaitu, Dusun Merpak, Dusun Batu Raya, Dusun Lawang Kuari, Dusun Sabang Laja, dan Dusun Luit Jaya.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang di dasarkan pada kurangnya sumber daya alam, rendahnya tingkat Pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan

pembangunan social dan ekonomi. Wujud nyata Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Dana Desa (DD) Kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa rangkaian konstitusi secara hukum.

Desa Merpak merupakan salah satu desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Pada Tahun 2020 Desa Merpak mempunyai jumlah dana Desa Sebesar Rp.738.006.000. Sejak digulirkanya Dana Desa (DD) di Desa Merpak yang tampak dari pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, dan penerangan Lampu jalan umum. Sumber penerimaan dana desa Merpak diperoleh dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), mekanisme penyaluran dana desa pada Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai dilakukan secara bertahap yaitu pertama 60% dan tahap kedua 40%. Pada tahun 2020 penggunaan dan desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai digunakan untuk 2 program kegiatan seperti pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti memilih periode Tahun 2020 Karena proses pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2020 di desa masih belum efisien, kurangnya pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa, dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di alokasikan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai kabupaten sintang. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2020 agar dapat di peroleh informasi yang lebih update.

Penelitian yang dilakukan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten sintang difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk Perangkat

Desa Merpak, karena Menurut salah satu kaur keuangan Desa Merpak, fenomena yang terjadi setelah diterapkan UU Desa tentang pengelolaan keuangan desa bahwa di desa tersebut SDM nya relatif rendah sehingga sangat susah diterapkan karena membutuhkan pelatihan yang memakan waktu cukup lama karena perangkat desa sangat banyak mulai dari kaur keuangan, kaur tata usaha & umum, kaur perencanaan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan dan kasi kesejahteraan oleh karena itulah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penerapannya. Sedangkan peraturan selalu berubah setiap tahunnya. Peraturan desa dari Permendagri berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga dalam penerapan UU ini tidak berjalan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) diharapkan dapat di pertanggungjawabkan. Sistem perencanaan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota agar perencanaan yang telah dibuat dapat selaras dan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan desa harus sejalan dengan rencana tim pelaksana, dan penduduk desa berhak mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Mepak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang** ”. penelitian tersebut di anggap penting karena Desa Merpak memiliki potensi daerah yang bagus yang dapat menunjang pendapatan asli desa sehingga dirasa perlu transparansi dana.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi yang bersangkutan

Sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten khususnya Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT .....	i
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR YURIDIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
RINGKASAN SKRIPSI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
BAB II .....	6
TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Landasan Teori Dan Kajian Empiris .....	6
2.1.1 Otonomi Daerah .....	6
2.1.2 Pengertian Desa .....	7
2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
2.3 Kerangka Konseptual .....	23
BAB III .....	24
METODE PENELITIAN .....	24
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	24

3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4	Lokasi Penelitian.....	26
3.5	Teknik Analisa Data .....	26
BAB IV	.....	24
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		24
4.1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	24
4.1.1	Perencanaan dan penganggaran Dana desa.....	28
4.1.2	Penatausahaan Dana Desa.....	33
4.1.3	Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD.....	38
4.1.4	Pengawasan Pengelolaan Dana Desa .....	43
4.1.5	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Merpak.....	43
4.1.6	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Dana Desa masih belum efektif 44	
4.1.7	Laporan Keuangan .....	45
BAB V	.....	46
PENUTUP.....		46
3.1	Kesimpulan.....	46
3.2	Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....		48

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu ..... 22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Pengelolaan Keuangan .....	15
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual .....	22
Gambar 4.1.1.1 mekanisme perencanaan dan penganggaran Dana Desa di Desa Mepak .....	30
Gambar 4.1.1.2 Contoh Buku Kas Umum Permendagri No. 113 Th. 2014..	34
Gambar 4.1.2 Buku Kas Umum Desa Mepak .....	34
Gambar 4.1.3 Buku Kas Pembantu Pajak .....	35
Gambar 4.1.4 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Mepak .....	36
Gambar 4.1.5 Buku Bank Desa .....	36
Gambar 4.1.6 Bukti Setoran Ke Kas Negara .....	41
Gambar 4.1.7 Bukti Penerimaan Negara .....	42
Gambar 4.1.8 LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDes Mepak T.A. 2020.....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Wawancara .....	51
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian .....	52
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....	55
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika *good governance* menjadi pertanda tercapainya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem pertanggungjawaban dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan dan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara efisien, berhasil dan bersih, bertanggung jawab dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Apriliani, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (romantis,2015).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah memiliki kontrol lebih besar atas pengelolaan wilayahnya. Salah satu bentuk kepentingan negara dalam pembangunan pedesaan adalah pemerintah menyediakan dana desa bagi desa dalam APBN untuk pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran, yang ditransfer untuk pembangunan desa dalam bentuk dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Desa merupakan unit terpenting dalam proses pembangunan setiap negara dan negara. Hal ini menjadikan desa sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan hak-hak publik oleh masyarakat setempat. Selain itu, desa menjadi ruang politik terdekat bagi hubungan masyarakat dengan penguasa (pejabat desa).

Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) mendefinisikan akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagai kemampuan perangkat desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Akuntabilitas mencakup lebih dari sekadar kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan saat ini. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Tata kelola pemerintahan dan administrasi bisnis harus fokus pada tujuan utama akuntabilitas, sehingga setiap pengelola dapat menyampaikan tanggung jawab keuangan dengan menyusun laporan keuangan.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu contoh daerah otonom di Kalimantan Barat yang beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sintang juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Desa Merpak merupakan desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Secara geografis Desa Merpak terletak dibawah kaki Bukit Kelam dan memiliki 1.215 penduduk, dan terbagi atas 5 Dusun yaitu, Dusun Merpak, Dusun Batu Raya, Dusun Lawang Kuari, Dusun Sabang Laja, dan Dusun Luit Jaya.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang di dasarnya kurangnya sumber daya alam, rendahnya tingkat Pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan

pembangunan social dan ekonomi. Wujud nyata Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Dana Desa (DD) Kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa rangkaian konstitusi secara hukum.

Desa Merpak merupakan salah satu desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Pada Tahun 2020 Desa Merpak mempunyai jumlah dana Desa Sebesar Rp.738.006.000. Sejak digulirkanya Dana Desa (DD) di Desa Merpak yang tampak dari pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, dan penerangan Lampu jalan umum. Sumber penerimaan dana desa Merpak diperoleh dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), mekanisme penyaluran dana desa pada Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai dilakukan secara bertahap yaitu pertama 60% dan tahap kedua 40%. Pada tahun 2020 penggunaan dan desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai digunakan untuk 2 program kegiatan seperti pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti memilih periode Tahun 2020 Karena proses pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2020 di desa masih belum efisien, kurangnya pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa, dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di alokasikan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai kabupaten sintang. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2020 agar dapat di peroleh informasi yang lebih update.

Penelitian yang dilakukan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten sintang difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk Perangkat Desa Merpak, karena

Menurut salah satu kaur keuangan Desa Merpak, fenomena yang terjadi setelah diterapkan UU Desa tentang pengelolaan keuangan desa bahwa di desa tersebut SDM nya relatif rendah sehingga sangat susah diterapkan karena membutuhkan pelatihan yang memakan waktu cukup lama karena perangkat desa sangat banyak mulai dari kaur keuangan, kaur tata usaha & umum, kaur perencanaan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan dan kasi kesejahteraan oleh karena itulah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penerapannya. Sedangkan peraturan selalu berubah setiap tahunnya. Peraturan desa dari Permendagri berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga dalam penerapan UU ini tidak berjalan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) diharapkan dapat di pertanggungjawabkan. Sistem perencanaan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota agar perencanaan yang telah dibuat dapat selaras dan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan desa harus sejalan dengan rencana tim pelaksana, dan penduduk desa berhak mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang** ”. penelitian tersebut di anggap penting karena Desa Merpak memiliki potensi daerah yang bagus yang dapat menunjang pendapatan asli desa sehingga dirasa perlu transparansi dana.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **3. Bagi Instansi yang bersangkutan**

Sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten khususnya Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.